

**MOTIF PERMOHONAN CERAI TALAK AKIBAT INTERVENSI
PIHAK KETIGA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



OLEH :

A Z M A N

NIM: 10321022463

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
R I A U
2010**

ABSTRAK

Judul Skripsi: **“MOTIF PERMOHONAN CERAI TALAK AKIBAT INTERVENSI PIHAK KETIGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU”**

Permasalahan dalam penelitian ini ialah : Motif kasus cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, konsekuensi pihak ketiga sebagai alasan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, serta tinjauan hukum Islam terhadap permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga dalam rumah tangga.

Lokasi penelitian ini adalah : Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah Pengadilan Agama Kelas I-A, yang menjadi contoh bagi Pengadilan Agama lainnya yang ada di Provinsi Riau, terutama masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif-motif kasus cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, seperti *Pertama*, orang tua ikut campur dalam masalah tempat tinggal anak dan menantu. *Kedua*, orang tua ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga anak dan menantu. *Ketiga*, orang tua ikut campur dalam masalah kebutuhan sekunder (peralatan dan perabotan) rumah tangga anak dan menantu. *Keempat*, orang tua ikut campur dalam masalah pertengkaran dan perselisihan anak dan menantu.W

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deduktif, Induktif, dan Deskriptif, terhadap data Primer dan data Sekunder. Data Primer ialah perceraian yang diakibatkan dari intervensi orang tua istri terhadap rumah tangga anak dan putusan-putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara: 484/Pdt.G/2007/PA.Pbr; Nomor Perkara: 263/Pdt.G/2007/PA.Pbr; Nomor Perkara: 370/Pdt.G/2008/PA.Pbr; Nomor Perkara: 0472/Pdt.G/2008/PA.Pbr; Nomor Perkara: 0590/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Pada tanggal 18 Februari 2009. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang

berkaitan dengan hukum Islam mengenai perkawinan (kehidupan rumah tangga) dan pendapat para responden (para pejabat-pejabat Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) mengenai intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motif permohonan cerai talak akibat intervensi (campur tangan) dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru, seperti masalah keuangan rumah tangga anak dan menantu, masalah tempat tinggal; banyak suami mengajak istrinya untuk pindah rumah, mertua tidak memberikan izin bahkan melarang anaknya untuk ikut suaminya. Maka wajib hukumnya bagi seorang istri untuk ikut dengan suaminya dan berdosa bagi orang tua yang menghalang-halangi niat baik dari suami anaknya (menantu) untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Karena, di dalam Islam apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya gugur dan berpindah ke tangan suaminya, dan tugas orang tua hanyalah memberi nasihat dan saran bila sang anak telah lalai akan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri. Oleh karena itu, orang tua haruslah cermat membaca dilema rumah tangga anak-anaknya. Sehingga mereka mampu memberikan solusi terbaik demi kekekalan rumah tangga sang anak, bukan malah menambah kekacauan hidup dalam rumah tangga sang anak.

Perselisihan/percekcokan suami-istri dalam rumah tangga, yang sering terjadi pada Sidang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, kesemuanya itu tidak terlepas dari campur tangan pihak ketiga, yaitu orang tua / sanak keluarga dalam sebuah rumah tangga. Ada sebagian rumah tangga dari suami-istri tersebut bisa diselamatkan, dengan perjanjian pindah atau hidup mandiri dari orang tua (mertua). Namun tidak sedikit dalam Sidang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, suami-istri tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan mengakhirinya dengan perceraian.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Permasalahan	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru	18
B. Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia	27
C. Visi dan Misi Peradilan Agama	27
D. Tata Tertib Pengadilan Agama	28
E. Majelis Pengadilan Agama	29
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	29
G. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru	34

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG INTERVENSI

A. Pengertian Intervensi	37
B. Bentuk-Bentuk Intervensi (Campur Tangan) Pihak Ketiga dalam Rumah Tangga	38

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intervensi (Campur Tangan)	
Pihak Ketiga dalam Rumah Tangga	43
D. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Anak	
Menikah	48

BAB IV PERMOHONAN CERAI TALAK AKIBAT INTERVENSI PIHAK KETIGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

A. Intensitas Kasus Cerai Talak Akibat Intervensi Pihak Ketiga di	
Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	52
B. Putusan Hakim Terhadap Motif Intervensi Pihak Ketiga Sebagai	
Alasan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama	
Kota Pekanbaru	67
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Cerai Talak	
Akibat Intervensi Pihak Ketiga dalam Rumah Tangga	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Riau yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Provinsi Riau tidak mempunyai Pengadilan Tinggi Agama dan masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kota Padang atau Mahkamah Syari'ah Kota Padang.¹

Sama hal dengan Pengadilan Agama lainnya yang ada di Indonesia, Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki tugas dan wewenang yang diatur menurut ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama bertugas berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam, waqaf dan shadakah.²

Selain wewenang tersebut di atas, Pengadilan Agama juga bertugas, berwenang memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara di bidang perceraian. Baik perceraian melalui cerai talak maupun cerai gugat.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: tp., 1995), h. 8

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Medan: Duta Karya, 1995), Cet. ke-1, h. 17

ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Maka dapat dipahami bahwa perkawinan dalam Islam bertujuan menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian, karena perceraian kendatipun halal akan tetapi suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan alternatif terakhir yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus atau terputusnya perkawinan. Salah satu di antaranya adalah; terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaq*.⁴ Dalam hal ini, al-Qur'an memberikan petunjuk pada surat an-Nisaa ayat 34 :

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, Ed. 2, h. 2

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-1, Ed. 1, h. 272

أرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم، فالصلحت قننت للغيب بما حفظ الله،
والتي تخافون نشوزهن فعظوهن هجروهن في المضاجع
واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان
عليك كبيرا. (النساء : ٣٤)

Artinya : “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. an-Nisaa’ : 35)⁵

Kemudian Allah menjelaskan lagi dalam ayat 35 yang berbunyi :

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها
إن يريدوا إصلا حايوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا.
(النساء : ٣٥)

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisaa’ : 35)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 123

⁶ *Ibid.*

Sebagaimana dalam Bab IV Hukum Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan pasal 76 yang berbunyi :

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi-saksi persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.⁷

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya dalam Bab XVI pasal 113 Kompilasi Hukum

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *op.cit.*, h. 24

⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 274

Islam sama dengan pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114 : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi dari pasal 39 UU Perkawinan ayat (1) yaitu untuk orang Islam.⁹

Dari pasal-pasal tersebut di atas, jelaslah bahwasanya putusnya perkawinan atau perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang cukup, yang menyebabkan antara suami-istri tersebut tidak dapat lagi menjalani hidup rukun sebagai suami-istri.

Dalam kehidupan rumah tangga, kedua orang tua memainkan peranan yang sangat penting dan fundamental terhadap kebahagiaan ataukah penderitaan rumah tangga putra dan putrinya di kemudian hari. Peranan kedua orang tua merupakan peranan yang sangat penting. Hanya saja peranan kedua orang tua terhadap putranya relatif lebih mudah dan lebih enteng daripada peranan kedua orang tua terhadap anak putrinya. Sebab masyarakat kita lebih cenderung melemparkan kesalahan kepada anak putri jika terjadi kegagalan dalam rumah tangga.¹⁰ Di dalam Islam apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya gugur dan berpindah ke tangan suaminya.¹¹

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *op.cit.*, h. 94

¹⁰ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. ke-4, h. 127

¹¹ Selamat Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Cet. ke-1, h. 157

Islam telah memberikan barometer yang jelas dan tegas. Apabila telah melaksanakan pernikahan seorang suami sudah barang tentu berhasrat ingin membahagiakan keluarga dalam kasih sayang tanpa campur tangan dari pihak manapun, dan secara prinsip seorang suamilah yang akan memimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.¹²

Dalam kehidupan keluarga, semacam sebuah kebiasaan dimana seorang anak (perempuan) telah menikah dengan seorang laki-laki (suaminya), suami harus tinggal dirumah istrinya (mertuanya) dalam satu rumah berselang beberapa waktu, sehingga anak dan menantu mendapatkan rumah sendiri. Dengan keberadaan tinggal pada satu atap dengan orang tua, ada beberapa permasalahan keluarga yang muncul, seperti ketersinggungan suami kepada orang tua istri atau sebaliknya yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, dan terkadang orang tua mengatur secara otoriter terhadap rumah tangga anak-anak mereka, sedangkan sang anak tidak mau rumah tangganya terlalu diatur oleh orang tua atau mertua. Sehingga fungsi sebagai kepala keluarga dan ibu dalam rumah tangga, tidak berperan lagi dalam rumah tangganya.

Menurut data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru tahun 2007-2008, jumlah perceraian akibat intervensi pihak ketiga tidak terdata. Pada tahun 2009 jumlah perceraian akibat intervensi pihak ketiga dalam keluarga di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru baru didata dengan jumlah 5 kasus perceraian. Maka penulis mengambil keseluruhan populasi dijadikan sampel. Diantaranya :

¹² Anshari Tahyib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), h. 1

1. Nomor perkara: 484/Pdt.G/2007/PA.Pbr. Atas nama M. TAUFIK SIREGAR bin H. ABDUL WAHID SIREGAR, sebagai “Pemohon” dengan ENDANG SETYAWATI binti YOS SUWARNO, sebagai “Termohon”. Dengan duduk perkara :

1.1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 5 Februari 2005 di Pekanbaru. Setelah menikah hidup bersama dan tinggal di Pekanbaru selama \pm 1 tahun dan telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu MUHAMMAD SAKTI AL WAHIDI SIREGAR (1.4 tahun);

1.2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk hidup mandiri, dimana sejak pernikahan Pemohon dan Termohon menumpang tinggal di rumah orang tua termohon;
- b. Termohon tidak bisa mengurus anak dan rumah tangga, tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan lebih memilih mendengar perkataan orang tua Termohon daripada Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;
- c. Adanya campur tangan pihak ketiga yaitu kakak kandung Termohon;
- d. Bahwa Termohon selalu meminta cerai dan mengancam akan menghancurkan karir Pemohon apabila keinginan Termohon tidak dikabulkan Pemohon.

- 1.3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan dengan melibatkan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon hilang kesabaran dan melanjutkan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Nomor perkara: 263/Pdt.G/2007/PA.Pbr. Atas nama MUHAMMAD SYAFI'I, S.Pd bin Dr. DASRIL MASKAR, M.BA., sebagai "Pemohon" dengan ALFA HARIANI, SE binti Ir. H. MUHARNES, sebagai "Termohon". Dengan duduk perkara :
 - 2.1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 Juli 2005 di Pekanbaru. Setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Pekanbaru dan selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama FASYA HARDA IFTITAH (Pr) lahir pada tanggal 10-04-2005.
 - 2.2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya pada hal Pemohon sudah mengontrakkan rumah;
 - b. Termohon lebih mendengarkan pendapat orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - c. Termohon selalu menceritakan perihal rumah tangga kepada orang tuanya sampai sekecil apapun, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan mertua;

d. Termohon dan orang tuanya mencaruti dan mengusir Pemohon beberapa kali supaya Pemohon keluar dari rumah tersebut, sampai-sampai Pemohon keluar dari rumah hanya dengan memakai celana pendek.

2.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan orang tuanya, dan orang tua Termohon sudah melarikan Termohon dan anak ke tempat lain sehingga Pemohon tidak dibolehkan bertemu dengan Termohon dan anak tersebut, karena itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon yang demikian.

3. Nomor perkara: 370/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Atas nama NOFRIZAL bin NASRUL, sebagai “Pemohon” dengan RIZA WAHYUNI binti TUKAR, sebagai “Termohon”.

Dengan duduk perkara :

3.1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Desember 2007 di Kabupaten Padang Pariaman-Sumbar. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon Padang Pariaman lebih kurang 10 hari, kemudian pindah ke Pekanbaru. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai keturunan.

3.2. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon dan Pemohon waktu menikah di jodohkan, jadi antara Termohon dan Pemohon tidak ada rasa cinta;
 - b. Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
 - c. Termohon tidak patuh dan suka melawan kepada Pemohon selaku suami;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sepakat untuk bercerai.
4. Nomor perkara: 0472/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Atas nama ALI AMRAN bin DARUS sebagai “Pemohon” dengan AGUSTINA SUSILAWATI binti NURMATHIAS, sebagai “Termohon”. Dengan duduk perkara :
 - 4.1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Maret 2001 di Pekanbaru. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah sendiri. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. AURELIA NOVANDA RAHMADANTI (Pr) Umur 7 Tahun;
 - b. ALVIRA OKTARIVA SALSABILA (Pr) Umur 5 Tahun;
 - c. ALTAF OKTHADAFAMRAN (Lk) Umur 9 Bulan.
 - 4.2. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2007 sebelum kelahiran anak ketiga antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Adanya campur tangan pihak orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada pembelaan terhadap suaminya, sehingga Termohon membenarkan orang tuanya;
 - b. Orang tua Termohon telah banyak menyinggung perasaan Pemohon, sehingga sulit bagi Pemohon untuk hidup bersama Termohon, sedangkan Termohon tidak ada 'itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan lebih memilih berpihak kepada orang tuanya;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah dua kali pisah rumah dan terakhir sejak 25 Januari 2008 telah menjalani hidup masing-masing.
- 4.3. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sudah menganjurkan kepada Pemohon meminta mengurus cerai ke Pengadilan Agama.
5. Nomor perkara: 0590/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Pada tanggal 18 Februari 2009. Atas nama DEDI SUHENDRA bin YAN HENDRI sebagai "Pemohon" dengan AFRINDA KURNIA NINGSIH binti UFRICAN, sebagai "Termohon". Dengan duduk perkara :
 - 5.1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2000 di KUA Kecamatan Bukit Kapur-Dumai. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru selama lebih kurang 6 tahun. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Fernanda Gemini Putri (Pr) berumur 7 tahun.

5.2. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon kurang taat dan patuh terhadap nasehat Pemohon selaku suaminya;
- b. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
- c. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon.

5.3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.¹³

Bertolak dari paparan latar belakang di atas, penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan motif intervensi orang ketiga dalam rumah tangga dan akibatnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis merumuskan judul penelitian sebagai berikut: **“MOTIF PERMOHONAN CERAI TALAK AKIBAT INTERVENSI PIHAK KETIGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU”**

¹³ Grafik Data Perkara pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Tahun 2007-2009

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terfokusnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang berhubungan dengan “Motif permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”.

C. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana intensitas kasus cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap motif intervensi pihak ketiga sebagai alasan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga dalam rumah tangga ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana intensitas kasus cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap motif intervensi pihak ketiga sebagai alasan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu motif permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
- b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya dan bagi perkembangan ilmu-ilmu hukum Islam pada umumnya terhadap masalah cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim dan humas Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek adalah Putusan-putusan Hakim

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tentang motif permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga.

3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu : sumber data Primer dan data Sekunder.

- a. Data *Primer*: yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tentang motif permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga.
- b. Data *Sekunder*: yaitu data pelengkap yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden, yakni para Hakim dan para Humas Pengadilan Agama Pekanbaru yang berkenaan dengan intervensi orang tua istri terhadap rumah tangga anak dan akibatnya di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari data dari dokumen perkara-perkara intervensi orang tua istri terhadap rumah tangga anak dan akibatnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

5. Metode Analisa Data

Analisa Data dapat dilakukan dengan teknik analisa kualitatif, yaitu menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang sejenis kemudian dianalisa, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

6. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. *Deduktif*, yaitu dengan mengemukakan data yang bersifat umum kemudian diuraikan dan disimpulkan secara khusus.
- b. *Induktif*, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan dan menguraikan data sesuai dengan fakta yang ada, kemudian dianalisa sehingga dapat disusun sebagaimana mestinya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisikan tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
- BAB III** : Tinjauan umum tentang intervensi, yang terdiri dari pengertian intervensi, bentuk-bentuk intervensi (campur tangan) pihak ketiga dalam rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi intervensi

(campur tangan) pihak ketiga dalam rumah tangga, dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah anak menikah.

BAB IV : Permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru terdiri dari; Bagaimana intensitas kasus cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Bagaimana putusan hakim terhadap motif intervensi pihak ketiga sebagai alasan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, serta tinjauan hukum Islam terhadap permohonan cerai talak akibat intervensi pihak ketiga dalam rumah tangga.

BAB V : Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Ditinjau dari sejarah, keberadaan Peradilan Agama mempunyai rangkaian sejarah yang sangat panjang, dimulai dari zaman pra penjajahan Hindia Belanda sampai pada saat sekarang ini. Berbicara sejarah Peradilan Agama di Pekanbaru, tentu tidak terlepas dari sejarah keseluruhan Peradilan Agama yang ada di Indonesia.

Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di bumi nusantara (Indonesia) sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya lembaga Peradilan Agama adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum oleh umat Islam.¹

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang sudah cukup tua, lebih tua dari Departemen Agama dan bahkan lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara, munculnya bertepatan atau berbarengan dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai, Demak, Mataram, Banten, Cirebon, dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Badan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara untuk melenyapkan gugat

¹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-2, h. 42

menggugat dan untuk menengahi konflik hukum syara' yang dipetik dari al-Qur'an dan hadits.²

Pada saat jayanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, lembaga Peradilan Agama dikenal dengan istilah *Mahkamah Syari'ah*, setelah bangsa Belanda mendominasi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum, maka pengaruh hukum Belanda sangat jelas terlihat dalam lembaga Peradilan yang ada, walaupun demikian keberadaan lembaga Peradilan Agama, khususnya agama Islam masih eksis hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Sebelum lembaga Peradilan Agama diresmikan pada tahun 1982, pemerintah Kolonial Belanda telah mengakui keberadaan dan berjalannya Peradilan Agama dikalangan umat Islam, diantaranya :

1. Pada bulan September 1908, ada suatu instruksi dari Hindia Belanda kepada para Bupati yang berbunyi : “Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, dan kasus banding dapat diajukan kepengadilan banding”.
2. Pada tahun 1820, melalui Stadblad Nomor 22 pasal 13 ditentukan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam, supaya para pemuka agama dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, pembagian pusaka, dan lain sebagainya. Dan istilah “Bupati” dalam

² T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 7

ketentuan tersebut di atas, dapat dikonklusikan bahwa Peradilan Agama telah ada di seluruh pulau Jawa.³

3. Pada tahun 1823 dengan Resolusi Gubernur Jendral pada tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12 diresmikan Pengadilan Agama di Kota Palembang yang diketuai oleh Pangeran/Penghulu. Sedangkan banding dapat dilakukan kepada Sultan.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga Peradilan Agama bagi umat Islam, meskipun di masa Penjajahan Belanda, namun lembaga Peradilan Agama tetap diberlakukan dan diakui keabsahannya oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat, Jambi pada tahun 1957 telah dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura dicantumkan dalam lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.⁴

Khusus untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat, Jambi pada tahun 1957 telah dibentuk Peradilan Agama yang berkedudukan di Padang. Dari pembentukan Mahkamah Syari'ah ini kemudian berkembang lembaga Peradilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau, termasuk Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

³ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, h 43

⁴ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Medan: Duta Karya, 1989), h. 1-2

Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau pada awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Padang. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada pasal 1 yang mengatur bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negara harus didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama dan cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu untuk memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersendiri di Kota Pekanbaru.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundang pada tanggal 09 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulam dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau, maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, dan atas usulan tersebut

⁵ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p., 1995), h. 8

Pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.⁶

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan *Meubeler* yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Samratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kontor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (Ketua Pertama) meninggal dunia tanggal 01 Januari 1970.

Sepeninggalan almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru diganti oleh Drs. H. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar

⁶ SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profile Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), h. 4

tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.⁷

Di tahun-tahun pertama berdirinya, Pengadilan tersebut boleh dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal ini disebabkan karena Islam Pekanbaru masih cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perkara perselisihan perkawinan atau thalak ke Kantor Urusan Agama. Selain itu, masyarakat Islam Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru. Juga antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak mengadili perkara-perkara, seperti perkara waris-mawaris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 :

“ Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang bergama Islam dan segala perkara yang menurut Hukum Islam, yang berkenaan dengan masalah nikah, thalak, rujuk, fasakh, mahar dan shadaqah, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta’lik sudah berlaku.⁸

Namun menurut Tarmizi, SH, salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, masalah waris mal waris merupakan wewenang Pengadilan Negeri

⁷ *Ibid*, h. 5

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2, h. 105

berdasarkan Statblad 1882 Nomor 152 yaitu Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka sering kali Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam. Dengan itu pula Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.⁹

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pemimpin dari Drs. H. Abbas Hasan yang dipindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini nama-nama Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dari awal sampai sekarang.

⁹ Abbas Hasan, *op.cit.*, h. 10

TABEL I
NAMA-NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
DARI AWAL SAMPAI SEKARANG

No	Nama	Tahun
1	K.H. Abdul Malik	1958 – 1960
2	Drs. H. Abbas Hasan	1960 – 1979
3	Drs. Amir Idris	1979 – 1987
4	Drs. H. Marjohan Syam, SH	1987 – 1994
5	Drs. Abdurrahman Har, SH	1994 – 1998
6	Drs. H. Lumbah Hutabarat, SH	1999 – 2001
7	Drs. H. Zein Ahsan	2001 – 2004
8	Drs. H. Harun S., SH, MH	2004 - 2006
9	Drs. H. Masrum, MH	2006 - 2007
10	Drs. M. Taufiq Hamami, SH	2007 - sekarang

Sedangkan alamat Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering mengalami perpindahan, adapun urutan-urutan alamat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jalan Rambutan No. 20 (1958 – 1966)
2. Jalan Riau Lama (1966 – 1971)
3. Jalan Samratulangi (1971 – 1973)
4. Jalan Singa (1973 – 1976)
5. Jalan Kartini (1976 – 1985)
6. Jalan Pelanduk No. 21 (1985 – 2007)
7. Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 (2007 – sekarang)

Terjadinya perpindahan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sampai berulang kali, dikarenakan Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada Kantor Kanwil Pertanian Provinsi Riau, Kanwil Depag, dan bahkan pernah menyewa rumah penduduk. Akan tetapi, pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru di pegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor sendiri di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di kompleks Kanwil Departemen Agama Propinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 01 Juli 2004 semua badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar,

namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga peradilan di Indonesia.¹⁰

B. Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.
5. Mewujudkan Institusi Peradilan yang Efektif, Efisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

C. Visi dan Misi Peradilan Agama

Visi

¹⁰ SY. Effendi Siregar, dkk, *op.cit.*, h. 6

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

Misi

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam di Indonesia di bidang Kekeluargaan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

D. Tata Tertib Pengadilan Agama

Sebaiknya Pengadilan Agama bertempat di kota pemerintahan, dan hakim dalam mengadili di tempat yang bisa terlihat oleh pengunjung. Diantara tata tertib pengadilan dan hakim adalah :

1. Bertempat tinggal di kota (tempat) pemerintahan, sebab lebih cepat bisa bertindak dan mendekati keadilan.
2. Dalam mengadili, hakim duduk di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh terdakwa, penggugat, dan pengunjung, sehingga menghilangkan syakwasangka.
3. Sebaiknya, tidak memutuskan perkara di masjid. Sebab di masjid tidak bisa bebas; seperti tidak bisa bersuara keras, tidak semua perempuan bisa masuk, dan lain sebagainya.¹¹

¹¹ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. ke-3, h. 377

E. Majelis Pengadilan Agama

Antara orang yang berselisih harus diperlakukan sama dalam 3 (tiga) hal, yaitu : (1) Tempat duduk, (2) kata-kata, (3) perhatian. Tempat duduk, artinya; masing-masing diberi kebebasan menyampaikan argumennya (alasan) dan mengemukakan pendapatnya. Masing-masing harus mendapat perhatian yang sama, artinya alasan-alasannya diperhatikan, dan pandangan hakim ke arah yang sama.¹² Sebagaiman yang diterangkan dalam firman Allah SWT :

كونوا قوامين بالقسط. (النساء : ١٣٥)

Artinya : “Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”.
(QS. an-Nisaa : 135)¹³

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, susunan organisasi Badan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sementara pasal 10 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa unsur Pimpinan Pengadilan Agama itu adalah Ketua yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958, disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa Orang Panitera Pengganti dan

¹² *Ibid*, h. 378

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 144

beberapa orang Jurusita. Sedangkan pasal 38 menegaskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Selanjutnya, pasal 43 Undang-Undang yang sama, menggariskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, sedangkan pasal 44 mengatur bahwa Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Adapun susunan/struktur Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2008, ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Drs. H. M. Taufiq Hamami, SH |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. H. Firdaus HM, SH |
| 3. Majelis Hakim | : Dra. Hj. Rismaniar HS, MH |
| | Dra. Hj. Mariati |
| | Drs. Lefni MD |
| | Dra. Ilfa Susanti, SH |
| | Drs. Sy. Effendi Siregar |
| | Dra. Hj. Syamsiah Junaid, SH, MH |
| | Drs. Ahmad Anshary M, SH |
| | Drs. Syarifuddin, SH |
| | Drs. Fachrurrozi, HI |
| 4. Panitera/Sekretaris | : Rasyidi MS, SH |
| 5. Wakil Panitera | : Abd. Gani Umar, SH |
| 6. Wakil Sekretaris | : Henny Musyarrofah, SH |

7. Panmud Permohonan	: Husni Djalil
8. Panmud Gugatan	: A. Rahim, S.Ag
9. Panmud Hukum	: Zulfitri, SH
10. Kasubag Keuangan	: Fadlul Akyar, SH
11. Kasubag Kepegawaian	: Kaharudin, SH
12. Kasubag Umum	: M. Jamil, M.Ag
13. Panitera Pengganti	: Hj. Marsidah, SH
	Akhyar
	Wan Wahid, BA
	Dra. Mas'udah Sugiarti
	Drs. Amri
	Ernawati, SH
	Nurhakim, SH
	Fahlinawati, SH
	Zahniar, SH
	Zulfahmi, S.Ag
	Hidayati, S.Ag
	Yulia Afriyanti, S.Ag
	M. Yunan, S.Ag
	Asmidar, S.Ag
	Zulhery Artha, S.Ag
	Umi Salmah, SH

14. Jurusita Pengganti

: Aguslim

Syukri

Hidayah

Komaria

Wawan Suwandi

Rini Artati

Selanjunya Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru
adalah sebagai berikut :

G. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

1. Tugas Pengadilan Agama

Menurut ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Waqaf dan Shadaqah.

Dalam ayat (2) menerangkan : Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Ayat (3) menerangkan : bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.¹⁴

2. Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai wewenang sebagai berikut :

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Medan: Duta Karya, 1995), Ed. 1, h. 17

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik di tingkat pertama, maupun di tingkat banding.¹⁵ Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kekuasaan relatif ini sangat penting untuk mengetahui ke pengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya.

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru-Riau.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkat Pengadilan.¹⁶

Mengenai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Izin Poligami | (Pasal 4 ayat 1) |
| 2) Izin Kawin bagi yang belum berusia 21 tahun | (Pasal 6 ayat 5) |
| 3) Dispensasi Kawin | (Pasal 7 ayat 1) |
| 4) Pencegahan Perkawinan | (Pasal 17 ayat 1) |

¹⁵ Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), h. 204

¹⁶ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 27

5) Penolakan Perkawinan	(Pasal 21 ayat 3)
6) Pembatalan Perkawinan	(Pasal 25)
7) Gugatan kelalaian kewajiban suami atau istri	(Pasal 34 ayat 3)
8) Perceraian karena thalak	(Pasal 39)
9) Gugatan perceraian	(Pasal 40 ayat 1)
10) Penyelesaian harta bersama	(Pasal 35)
11) Penguasaan anak	(Pasal 41 sub a)
12) Biaya penghidupan istri	(Pasal 41 sub c)
13) Biaya pemeliharaan anak	(Pasal 41 sub c)
14) Kedudukan anak atas dasar tuduhan zina	(Pasal 44 ayat 2)
15) Pencabutan kekuasaan orang tua	(Pasal 49 ayat 1)
16) Penunjukan dan pencabutan kekuasaan wali	(Pasal 53 ayat 2)
17) Tuntutan ganti rugi atas wali	(Pasal 54)
18) Penetapan asal usul anak	(Pasal 55 ayat 2)
19) Pengesahan kawin campur	(Pasal 60 ayat 5)
20) Perkawinan poligami	(Pasal 65 ayat 5)

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu institusi Pengadilan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG INTERVENSI

A. Pengertian Intervensi

Kata “*Intervensi*” diartikan; “Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara dan sebagainya).”¹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “*Intervensi*” yang berarti “Ikut campur tangan dalam urusan negeri orang (oleh negara atau organisasi lain).”²

Intervensi (*Interventie*) dapat diartikan sebagai berikut : (1) Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak baik orang, golongan, negara dan sebagainya. (2) Ikut serta dalam satu hal. Misalnya dalam satu perkara perdata suatu pihak yang berkepentingan melibatkan diri dalam perkara (intervensi).³

Dan di lain pihak menyatakan bahwa “*Intervensi*” adalah menggabungkan diri dalam perkara perdata. Turut campur, campur tangan. Diantaranya :

- 1) Pada umumnya sengketa perdata terdiri dari penggugat dan tergugat. Seperti adanya pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung :
 - a. *Voeging* (Menyertai) : Pihak ketiga turut campur dalam sengketa dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak biasanya pihak tergugat. Disyaratkan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. ke- 4, Edisi. 3, h. 439

² W. J. S. Poerwadarminta, diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. ke-3, Edisi. 3, h. 450

³ B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), Cet. ke- 1, h. 115

harus adanya kepentingan hukum dari pihak ketiga tersebut yang ada hubungannya dengan pokok sengketa antara penggugat dan tergugat.

b. *Tussenkomst* (Menengahi) : Turut campurnya pihak ketiga untuk menuntut haknya sendiri kepada penggugat dan tergugat, untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Disyaratkan juga harus ada kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung, harus ada hubungan dengan pokok sengketa antara penggugat dengan tergugat.

2) Mencampuri urusan dalam negeri/negara lain. Suatu negara lain turut campur terhadap pergolakan di negara lain, negara tetangga dan sebagainya, biasanya dengan kekerasan senjata.⁴

B. Bentuk-Bentuk Intervensi (Campur Tangan) Pihak Ketiga dalam Rumah Tangga

Ada beberapa macam bentuk campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga, seperti campur orang tua dalam rumah tangga anak. Hal ini dapat digambarkan :

1. Orang tua ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga anak;

Memberikan tunjangan keuangan kepada istri adalah kewajiban bagi suami. Yaitu bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah bagi istrinya seperti : makanan, pakaian, rumah (tempat tinggal), dan pengobatan. Ia dianggap bersalah bila tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri dan dapat dihukum oleh pengadilan.

⁴ Zainul Bahry, *Kamus Umum (Khususnya Bidang Hukum & Politik)*, (Bandung: Angkasa, 1996), Cet. ke- 1, h. 118

Seseorang atau suatu keluarga tidak dapat hidup tanpa uang. Mereka semua memerlukan makanan, obat-obatan, pakaian dan tempat tinggal. Namun, kadang-kadang mereka menginginkan hal-hal yang tidak begitu penting, yang dalam hal ini dapat tidak dikabulkan dan keinginan-keinginan mereka yang beraneka ragam itupun tidak perlu dipenuhi.⁵

Sehingga banyak terjadi perselisihan atau percekocokan antara suami-istri dalam menangani masalah keuangan rumah tangga, kesemuanya itu tidak terlepas dari campur tangan dari pihak ketiga, seperti orang tua (mertua), dan sering dipicu oleh orang tua (ibu) dari pihak istri.

Oleh sebab itu, orang tua (mertua) tentu dapat memahami bahwa dalam mengungkapkan kecintaan kepada anak-anak, setiap orang tidaklah sama, terutama dalam hal materi. Ini disebabkan karena setiap orang mempunyai tingkatan kekayaan dan kemampuan rumah tangga yang berbeda. Bagi mereka yang diberi keleluasan harta, hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi, bagi mereka yang disempitkan rezkinya, maka pengungkapannya terbatas menurut kemampuannya. Maka, orang tua (mertua) agar dapat memahami keadaan keuangan rumah tangga anak-anak mereka.⁶

⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-6, h. 187

⁶ M. Thalib, *10 Harapan Menantu kepada Mertua*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), Cet. ke-1, h. 48

Karena, Islam telah menetapkan bahwa seorang suami wajib memberikan jaminan dari segi materi kepada seorang wanita yang telah ia pilih menjadi istrinya. Dan Islam pun telah mengkategorikan nafkah sebagai salah satu hak istri dari suaminya, baik sang istri itu orang kaya maupun orang miskin.⁷ Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَلَيَنْفِقَ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عَسْرٍ يَسْرًا. (الطلاق : ٧)

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. ath-Thalaaq : 7)⁸

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. diterangkan :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك (رواه مسلم)

⁷ Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. ke-3, h. 28

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 946

“Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Satu dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu maka yang paling besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu” (HR. Muslim).⁹

2. Orang tua ikut campur dalam masalah tempat tinggal.

Banyak dari konflik rumah tangga berawal dari keikutsertaan orang tua yang selalu mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya. Dan banyak daripada orang tua (mertua) ingin anak dan menantunya tetap tinggal bersama-sama dengannya (orang tua), alasan orang tua, anak yang baru berumah tangga perekonomiannya belum stabil, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui, jika seseorang telah melangsungkan akad nikah dengan memenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya, maka wanita sah menjadi istri dari suaminya, dan ia wajib mentaatinya. Salah satu dari tanda ketaatan istri kepada suaminya adalah pindah ke rumah yang telah disediakan suaminya.¹⁰ Para ulama mengatakan demikian berdasarkan firman Allah yang ditujukan kepada para suami terhadap istri mereka :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ.... (الطلاق : ٦)

⁹ Muslich Shabir, *Terjemah Riayadlus Shalihin*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1985), Cet. ke-1, h. 270

¹⁰ Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 1 : Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet. ke-6, h. 235

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ...”. (QS. at-Thalaaq : 6)¹¹

Para fukaha telah menetapkan bahwa termasuk hak seorang suami ialah menempatkan istri di rumahnya, dan melarangnya keluar dari rumah kecuali untuk keperluan-keperluan yang dibenarkan syariat, seperti mengunjungi kedua orang tuanya dan melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Para fukaha juga mengatakan bahwa termasuk hak suami ialah membawa pindah istrinya ke tempat mana saja yang dia inginkan, asal itu tidak dilakukan dengan maksud membahayakan dan menyakiti istrinya. Bahkan hal itu wajib dilakukan dengan maksud untuk dapat hidup bersama dengan baik, bukan dengan maksud menumbuhkan permusuhan dan pertentangan diantara mereka (orang tua dengan menantu).

Semua itu apabila suami meminta kepada istrinya atau keluarga istri, supaya sang istri pindah bersama ke rumahnya. Namun jika suaminya tidak meminta, dan bersepakat dengan istri dan keluarga istri untuk tinggal di rumah keluarga istri selama sehari, sebulan, atau lebih, maka agama tidak melarang. Karena itu berlaku berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pada sebagian negeri Islam terdapat kebiasaan bahwa seorang istri bersama suaminya tinggal untuk beberapa lama di keluarga istri. Kebiasaan ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam. Bahkan hal ini

¹¹ Depag RI, *op.cit.*, h. 946

menjadi salah satu penyebab semakin kuatnya hubungan cinta dan kasih sayang di antara suami dengan istri, dan juga diantara suami dengan keluarga istri.¹²

Namun, jika maksudnya adalah keluarga istri atau yang lainnya melarang istri untuk pindah ke rumah suaminya, maka jawabannya ialah bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk melarangnya. Karena kepindahan istri ke rumah suaminya segera setelah dilangsungkannya akad nikah bukanlah suatu yang haram, selama istri tersebut pindah ke suatu lingkungan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.¹³

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intervensi (Campur Tangan) Pihak Ketiga dalam Rumah Tangga

1. Faktor Ekonomi

Jikalau secara nasional ada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka yang ketiga perlu ada APBRT (Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Tangga). Laki-laki sebagai kepala keluarga adalah penanggung jawab utama dalam memberi nafkah rumah tangga.¹⁴ Sebagaimana dalam firman Allah :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم. (النساء : ٣٤)

¹² Ahmad asy-Syarbashi, *op.cit.*, h. 236

¹³ *Ibid*, h. 237

¹⁴ H. Bgd M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), Cet. ke-2, h. 18

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. an-Nisaa: 34)¹⁵

Tidak diragukan lagi bahwa pembentukan keluarga dapat mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, baik dalam kehidupan individu dan terutama dalam eksistensi umat.¹⁶ Dan tidaklah juga berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan kestabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga yang beraneka ragam macamnya bisa terpenuhi jika ekonominya lancar. Sebaliknya, kericuhan-kericuhan rumah tangga yang sering terjadi, yang diakhiri dengan perceraian, disebabkan oleh masalah ekonomi dalam keluarga.¹⁷

Oleh sebab itu, kebanyakan dari pasangan suami-istri, ketika memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Mereka berencana membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera di dalam istana yang megah. Dengan penuh kasih sayang dan cinta. Seorang suami hendak memenuhi segala harapan istri dan keluarganya. Ia berketetapan hati untuk membangun hidupnya sebagai yang terbaik,

¹⁵ Depag RI, *op.cit.*, h. 123

¹⁶ Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Cet. ke-9, h. 117

¹⁷ Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaiiku*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-7, h. 61

seperti : membangun rumah yang megah, perabot rumah tangga yang mewah, dan harta yang berlimpah.¹⁸

Namun tidak sedikit kehancuran rumah tangga yang disebabkan banyaknya tuntutan dari pihak istri yang luar biasa dan tidak terjangkau oleh suami, menjadikan suami resah, bimbang, lalai, dan putus asa. Beban berat yang terus menerus mempengaruhi pikirannya. Sementara suami sudah tidak mampu melakukan dialog secara terbuka dan mengintropeksi kembali pernikahan yang masih baru. Karena selalu tidak siap membayangkan apa yang akan terjadi pada rumah tangganya nanti. Berbagai macam problematika, bisa tercermin pada perilaku sang suami. Karena setiap hari dihadapkan pada berbagai macam kebutuhan istri, perasaan cinta dan kasih sayang lambat laun mulai menjauh dari benaknya. Tenggelam dalam persoalan keluarga, namun tidak dapat dielakkan, rumah tangga sekarang berada diambang malapetaka yang sangat besar. Saat inilah seorang suami merasakan bahwa apa yang dia impikan telah melenceng jauh dari kenyataan-kenyataan yang berada di hadapannya.¹⁹

2. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap kepribadian suami-istri berdasarkan kenyataan, bahwa keduanya berkembang di bawah dua bentuk pembinaan dan pendidikan yang berbeda, yaitu :

¹⁸ Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa ? : Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), Cet. ke-1, h. 50

¹⁹ *Ibid*, h. 53

- a. Kedudukan, kebijaksanaan dan ketegasan seorang ayah, yang biasanya ditakuti oleh anak-anak, sehingga anak-anak dapat mencegah melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai ayahnya.
- b. Kasih sayang seorang ibu dan spiritnya yang terus menerus, yang mempererat jalinan kasih sayang antara ibu dan anak, menjadikan ia tidak keberatan mengungkapkan segala keluh kesahnya dan mendengar segala arahan ibunya yang mencakup berbagai aspek.²⁰

Adanya faktor wibawa dan kasih sayang ini, menjadikan seorang anak selalu memperhatikan dengan seksama terhadap hubungan keduanya, seperti pertengkaran, perdebatan, perselisihan, dan sampai pada perceraian. Dalam kesehariannya, ia selalu mendapat pengalaman-pengalaman hidup dari ibunya. Begitu juga ayahnya juga aktif memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan.

Oleh sebab itu, dari beberapa spek, lingkungan keluarga memiliki kedudukan yang penting, yaitu :

- a. Membentuk pola hubungan keluarga berdasarkan teori dan praktek.
- b. Membentuk pola hubungan dengan orang lain, baik secara terbuka maupun tertutup, sehingga timbul adaptasi (penyesuaian) antara dia dengan dunianya.
- c. Membentuk konsep struktur rumah tangga, seperti dalam hal mewujudkan bangunan, perabotan dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya.²¹

²⁰ *Ibid*, h. 61

²¹ *Ibid*, h. 62

3. Faktor Agama

Banyak suami-istri yang berselisih dalam rumah tangga akibat dari campur tangan orang tua, dan biasanya berakhir pada perceraian. Perintah orang tua kepada anaknya untuk menceraikan istri baru wajib dilaksanakan bilamana orang tua tersebut benar-benar orang yang sangat kuat agamanya dan mendasarkan setiap tingkah lakunya semata-mata pada alasan-alasan agama. Akan tetapi, bila ternyata orang tua bukan orang yang mendasarkan setiap tingkah laku dan perbuatannya pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib bagi anak untuk mematuhi perintah orang tua tersebut.²²

Bagaimana halnya dengan orang tua yang ternyata agamanya lemah dan akhlaknya cenderung mengabaikan agama, bahkan lebih mengutamakan pertimbangan materi atau kepentingan duniawi. Bila mereka (orang tua) meminta anaknya bercerai dari suami atau istrinya yang tidak disukai, mungkin disebabkan beberapa hal, seperti materi atau harta, dan lain sebagainya. Menanggapi hal semacam ini anak yang bersangkutan haruslah menanyakan alasan-alasan syar'i kepada orang tuanya tentang perintahnya untuk bercerai dari suami atau istrinya. Bilamana alasan-alasan tersebut ternyata sama sekali tidak berdasarkan aturan syar'i, maka anak tidak wajib mentaatinya dan tidak berdosa bila melanggar perintah orang tuanya. Bahkan ia wajib mengingatkan orang tuanya agar kembali

²² M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), Cet. ke-1, h. 74

kepada garis ketentuan syar'i sehingga tidak terjerumus pada jalan yang keliru atau menyesatkan.²³

D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Anak Menikah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa batas kewajiban orang tua terhadap sang anak sampai sang anak mencapai usia baligh, kecuali ada faktor lain yang menyebabkan keadaan sang anak masih tetap berada dalam tanggungan orang tuanya. Ketika si anak telah berumah tangga, maka lepaslah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, posisi orang tua di hadapan keluarga si anak hanyalah sebagai pengontrol dan pengawas di balik tabir. Sedangkan eksistensi saran orang tua hanya sebagai penguat (*muakkid*) dari ajaran-ajaran agama.

Lalu bagaimana mestinya sang anak menyikapi saran yang diberikan oleh orang tua? Sebuah keharusan orang tua untuk memberikan saran terhadap sang anak ketika terjadi konflik yang membelenggu rumah tangganya. Saran tersebut tentu harus berpijak pada perbaikan rumah tangga sang anak. Namun, apakah saran orang tua bersifat mengikat atau tidak? Dalam artian, wajib ditaati oleh sang anak atau tidak.

Anak (perempuan) wajib mengikuti saran orang tua kalau memang suaminya nyata-nyata berbuat kesalahan dalam rumah tangganya. Seperti perselingkuhan, mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah, dan lain sebagainya. Itu jelas dilarang oleh agama. Dalam kondisi seperti ini, mutlak saran orang tua sangat dibutuhkan.

²³ *Ibid*, h. 76

Sebaliknya, saran orang tua menjadi tidak wajib diikuti ketika isinya mengarah kepada kehancuran rumah tangga sang anak. Seperti cerai menjadi pilihan satu-satunya orang tua ketika terjadi masalah sepele dalam rumah tangga anak. Karena tindakan orang tua tersebut menyalahi tujuan awal disyariatkannya pernikahan, yaitu kebahagiaan dalam ikatan perkawinan.²⁴

Adalah wajib atas kedua orang tua mengajari anak perempuan mereka segala adab pergaulan, terutama pergaulan terhadap suami dalam rumah tangga. Asma' binti Kharijah al-Fizariy, pernah berpesan kepada putrinya pada saat akan dikawinkan : “Ketahuilah bahwa engkau akan keluar dari rumah masa kecilmu yang engkau dibesarkan di dalamnya. Dan kini engkau akan segera berpindah ke rumah yang tidak kau kenal sebelumnya, serta teman hidup yang engkau belum terbiasa dengannya. Maka jadilah engkau “bumi” baginya, agar ia menjadi “langit” bagimu. Jadilah engkau hamparan baginya, agar ia menjadi sandaran kokoh bagimu. Dan jadilah engkau sahayanya agar ia menjadi hambamu. Jangan mengganggunya dengan banyak permintaan; nanti ia membencimu. Dan jangan membuat jarak antara dirimu dan dirinya; nanti ia melupakanmu. Apabila ia mendekat, dekatlah kepadanya. Dan apabila ia sedang ingin menyendiri, jauhlah darinya. Jagalah dirimu dari hidung, telinga dan matanya. Sedemikian sehingga ia tidak akan sekali-kali mencium darimu selain

²⁴ Abu Yasid, *Fiqh Today : Fikih Keluarga (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Cet. ke-1, h. 36

yang harum, tidak mendengar darimu selain yang baik, dan tidak melihat darimu selain yang indah”.²⁵

Maka daripada itu, sebagai orang tua yang bijaksana, tentunya mereka tidak mendeckte rumah tangga anak-anaknya walaupun sebenarnya mereka banyak menabung jasa pada sang anak. Namun, bukan berarti jasa-jasa itu lalu menjadi belenggu pada proses pematangan hidup sang anak. Tujuan baik, tapi dengan cara yang salah maka tujuan itu akan dirasa salah. Seperti niat baik orang tua bagi masa depan sanga anak, tapi caranya bukan lantas dengan ikut campur terlalu dalam, apalagi menguasai dan membelenggu urusan-urusan anak yang sesungguhnya sudah membangun rumah tangga sendiri secara matang dan mandiri.²⁶

Disini dapat kita katakan bahwa kebahagiaan putra dan putri dalam kehidupan rumah tangganya juga kembali kepada latar belakang orang tua (ayah dan ibunya). Sebab pola pembentukan yang diterima anak pada masa kecilnya merupakan faktor yang paling kuat dalam membentuk kepribadian dan kejiwaannya setelah ia menginjak dewasa dan berumah tangga.²⁷

Karena, adab dan perlakuan yang baik terhadap kedua orang tua menyeru agar seorang anak memiliki adab terhadap kedua orang tua, menjaga hak mereka dengan memberikan perhatian kepada mereka, serta mendengarkan nasihat mereka. Seorang

²⁵ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata-cara dan Hikmahnya*, (Bandung: Karisma, 1999), Cet. ke-10, h. 138

²⁶ Abu Yasid, *op.cit.*, h. 37

²⁷ Butsainan as-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. ke-4, h. 126

anak juga harus berupaya semampunya untuk membuat kedua orang tua rela dengan pandangan dirinya dengan cara yang sopan dan penuh penghormatan. Ia juga harus mengatakan kepada keduanya dengan lembut, ramah, dan pandai, bahwa ia sendiri yang akan menikah dan bahwa dia yang akan memiliki ikatan dengan seorang perempuan sebagai istri dalam segala hal di rumah tangga.²⁸

²⁸ Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 5 : Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet. ke-3, h. 89

BAB IV
PERMOHONAN CERAİ TALAK AKIBAT INTERVENSI PIHAK KETIGA
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBAU

A. Intensitas Kasus Cerai Talak Akibat Intervensi Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Tingginya tingkat perceraian pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru antara suami-istri dalam rumah tangga tidak terlepas dari campur tangan pihak ketiga. Ketika suami-istri dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan/percekcokan, baik perselisihan/percekcokan itu berbentuk dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, peralatan dan perabotan rumah tangga, kesemuanya itu tidak terlepas dari campur tangan pihak ketiga baik itu dari orang tua, ipar, dan saudara lainnya. Sehingga banyak pasangan suami-istri akibat dari campur tangan pihak ketiga tersebut mengakhiri rumah tangganya dengan cara mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Setelah hakim mendengar kerangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, akhirnya permohonan cerai talak pemohon dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.¹

Tidak sedikit pasangan suami-istri yang memutuskan hubungan perkawinan (bercerai) dalam usia pernikahan dini. Ada yang beranggapan bahwa lima tahun pertama perkawinan adalah masa-masa yang rawan, dan ada yang mengatakan bahwa

¹ Drs. Sy. Effendi Siregar, Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, wawancara, 12 Agustus 2009

dua tahun pernikahan adalah masa-masa kritis. Memang, ada teori mengatakan lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun dalam perkawinan adalah masa-masa krisis. Anggapan ini dapat kita temukan dalam setiap kasus yang ditangani oleh BP-4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian), ada kasus-kasus dalam rumah tangga yang berakhir dengan damai kembali, dan tidak sedikit pula mereka yang harus berakhir dengan perceraian diputuskan hakim di muka sidang Pengadilan Agama. Khususnya Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.²

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Jikalau kita ingin keberhasilan pembangunan bangsa, tidak boleh tidak, kita harus bertolak dari rumah tangga. Rumah tangga adalah kunci dan modal dasar tercapainya pembangunan. Usaha untuk membahagiakan dan menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran dan keruntuhan, berarti kita telah menyelamatkan dan membahagiakan negara.³

Imam besar Syekh Muhammad Syaltut, mengatakan : “Tidaklah diragukan lagi bahwa keluarga adalah batu dasar dari bangunan suatu umat (bangsa) yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang berhubungan erat satu dengan lainnya. Dan pastilah kuat/lemahnya bangunan umat itu tergantung kepada kuat lemahnya keluarga yang menjadi batu dasar tersebut”.

² Drs. Syarifuddin, SH., Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, wawancara, 10 Agustus 2009

³ H. Bgd M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), Cet. ke-2, h. 1

Prof. Dr. A. Mukti Ali, menerangkan bahwa : “Untuk membangun negara yang kuat, apabila dalam negara itu terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang kuat. Negara yang adil terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang adil dan negara yang makmur adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang makmur. Kalau kita ingin membangun negara dengan sebaik-baiknya, maka rumah tangga harus kita bangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga mustahil akan tercapai pembangunan negara”.⁴

Banyak tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya kehidupan rumah tangga, baik dari suami maupun dari istri, diantaranya :

Suami :

1. Mencela istri di hadapan orang lain;
2. Tidak mengajak istri bermusyawarah dalam suatu masalah;
3. Berlaku kasar dan tidak sopan pada istri;
4. Meninggalkan rumah pada saat harus di rumah, tanpa sepengetahuan istri;
5. Mudah menerima aduan orang lain tentang kejelekan istri;
6. Terlalu mementingkan famili sendiri.

Istri :

1. Memerintah suami seenaknya saja;
2. Membanggakan kekayaan famili di hadapan suami;
3. Mudah percaya kepada aduan orang lain tentang kejelekan suami;

⁴ *Ibid.*

4. Terlalu menuntut kepada suami;
5. Terlalu menyerahkan urusan rumah tangga kepada orang lain;
6. Mengadukan kesulitan rumah tangga kepada suami di saat suami sedang sulit;
7. Terlalu mementingkan famili sendiri.⁵

Banyak masalah-masalah yang sering muncul dalam suatu rumah tangga, tidak hanya dengan pasangan hidup tapi juga dengan kerabat-kerabat yang ada. Karena orang menikah bukan hanya mempersatukan mereka berdua, tetapi mesti juga menyatukan seluruh anggota keluarga yang ada. Yang sering kita jumpai atau kita temui di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, ada kecenderungan dalam rumah tangga adanya campur tangan dari pihak ketiga seperti orang tua dari istri atau suami (mertua) maupun ipar. Maka daripada itu, hubungan pasangan suami-istri dalam rumah tangga biasanya baik-baik saja, tetapi bisa jadi dengan orang tua istri atau suami (mertua) susah untuk menyesuaikan diri. Bahkan sering terjadi munculnya konflik yang berawal dari hubungan mertua dengan menantu, dan tak jarang konflik tersebut mengancam dari keutuhan perkawinan dalam rumah tangga anak.

Karena, sangat jarang terjadi perceraian yang disebabkan oleh faktor kedua pasangan suami-istri. Apabila orang tua dari pihak perempuan (istri) dapat menyebabkan terjadinya perceraian, maka tidak berbeda halnya dengan orang tua dari pihak laki-laki (suami) yang juga memiliki potensi peranan dalam memicu perpecahan dalam rumah tangga anak.

⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 83

Di berbagai wilayah masyarakat, masih banyak ditemukan antara istri dan keluarganya, istri dan saudara perempuan suami (ipar) dan lain-lain merupakan lawan yang tidak bisa bertemu (rukun). Ini adalah kenyataan yang banyak terdengar di mana-mana. Sehingga seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi.⁶

Sehingga, banyak ditemukan konflik suami-istri dalam rumah tangga yang berawal dari keikutsertaan atau campur tangan pihak ketiga dalam mengurus rumah tangga seseorang, baik dari pihak orang tua, saudara, dan lain sebagainya.

Banyak dari pasangan suami-istri yang mengatakan : “Bahwa orang tua (mertua) baik dari pihak istri maupun suami selalu mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya, orang tua (mertua) masih merasa bahwa anaknya (istri dari menantunya) masih merupakan tanggung jawabnya dan keluarganya. Ketika terjadi perselisihan antara suami-istri dalam rumah tangga, baik itu dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, peralatan dan perabotan rumah tangga, dan biasanya orang tua istri (mertua) selalu ikut campur dan sering memojok menantu sebagai suami dari anaknya”.⁷

Ada beberapa bentuk cerai talak yang diputuskan hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru akibat intervensi (campur tangan) pihak ketiga, diantaranya sebagai berikut :

⁶ Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa ? (Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga)*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), Cet. ke-1, h. 70

⁷ Zulfitri, SH, Hubungan Kemasyarakatan (Humas) Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, wawancara, 10 Agustus 2009

1. Orang tua Termohon (istri) selalu ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon (suami-istri). Perkara Nomor : 0590/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Pada tanggal 18 Februari 2009.
2. Orang tua (mertua) ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga anak, sehingga Termohon (istri) tidak jujur dalam masalah keuangan. Perkara Nomor : 0590/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Pada tanggal 18 Februari 2009.
3. Orang tua Termohon (istri) ikut campur dalam masalah tempat tinggal anak. Sehingga Termohon (istri) selalu menolak ajakan Pemohon (suami) untuk hidup mandiri, dimana sejak pernikahan Pemohon dan Termohon menumpang tinggal di rumah orang tua Termohon (istri). Perkara Nomor: 484/Pdt.G/2007/PA.Pbr.
4. Orang tua Termohon (istri) ikut campur dalam masalah tempat tinggal anak. Sehingga Termohon (istri) tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya, pada hal Pemohon (suami) sudah mengontrakkan rumah. Perkara Nomor: 263/Pdt.G/2007/PA.Pbr.
5. Adanya campur tangan pihak ketiga selain orang tua yaitu kakak kandung Termohon (istri). Perkara Nomor: 484/Pdt.G/2007/PA.Pbr.
6. Adanya campur tangan pihak orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada pembelaan terhadap suaminya, sehingga Termohon membenarkan orang tuanya. Perkara Nomor: 0472/Pdt.G/2008/PA.Pbr.
7. Orang tua (mertua) ikut campur dalam masalah kegiatan sehari-hari anak dan menantu. Sehingga Termohon (istri) selalu menceritakan perihal rumah tangga kepada orang tuanya sampai sekecil apapun, sehingga memicu pertengkaran

dan perselisihan antara Pemohon (suami) dan mertua. Perkara Nomor: 263/Pdt.G/2007/PA.Pbr.

8. Orang tua dan Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon. Perkara Nomor: 370/Pdt.G/2008/PA.Pbr.

Pada beberapa dekade sebelum ini, cukup banyak suami-istri yang berkumpul dalam satu rumah dengan orang tua (mertua) baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, dan cukup banyak sang suami merasa bahagia bisa berkumpul dengan mertuanya, dan diantara mereka terjalin kasih, cinta, dan kerjasama yang baik. Tapi sekarang, biasanya seorang suami memimpikan sebuah rumah tangga sendiri yang bebas, yang dihuni hanya dengan pasangan hidupnya (istri), agar di dalam kehidupan rumah tangga mereka bisa hidup bebas bergerak dan menangani masalah-masalah keluarga secara bersama-sama. Para suami atau istri yang menolak hidup di rumah orang tua (mertua) karena selalu dibayang-bayangi mimpi buruk tentang kemerdekaan yang terkandung dalam sebuah pepatah : “Jauhkan dirimu, niscaya engkau akan dicintai”.⁸

Dengan demikian diantara kendala-kendala seorang anak yang cukup serius adalah terlalu ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak. Dan pernah juga kita mendengar ada sebuah perkawinan yang gagal akibat campur tangan orang tua (ibu mertua). Pada mulanya semua permasalahan rumah tangga anak berjalan dengan baik, tetapi karena intervensi orang tua (mertua) suatu jalinan rumah tangga yang telah

⁸ Butsainan as-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. ke-4, h. 177

terpatri, perkawinan telah melaju dalam samudera dengan baik, namun tiba-tiba di tengah perjalanan gagal dan berantakan hanya karena intervensi pihak ketiga yaitu orang tua baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki (orang tua/mertua).⁹

Lalu muncul pertanyaan bagi kita semua, salahkah bila orang tua ikut campur, mengatur dan menentukan kebijakan dalam urusan rumah tangga anaknya ?

“Adalah suatu kecerobohan jika orang tua baik dari pihak suami atau istri terlalu mencampuri dalam segala persoalan urusan rumah tangga anak-anaknya. Karena jelas dalam tindakan semacam ini akan menimbulkan dampak negatif, ruang gerak sang anak (suami-istri) menjadi terbatas serta tidak bisa leluasa mengembangkan diri ke arah yang lebih bermaslahah. Padahal mereka berdua (suami-istri), terutama suami, yang lain berhak mengatur segala urusan rumah tangganya, bukan orang tua (mertua). Karena yang menjalani kehidupan rumah tangga adalah sang anak. Tugas orang tua hanyalah memberi nasihat dan saran bila sang anak telah lalai akan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri. Oleh karena itu, orang tua (mertua) haruslah cermat membaca dilema rumah tangga anak-anaknya. Sehingga mereka mampu memberikan solusi terbaik demi kekekalan rumah tangga sang anak, bukan malah menambah kekacauan hidup dalam rumah tangga sang anak.”¹⁰

⁹ Abdullah Nasikh ‘Ulwan, *Perkawinan : Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Cet. ke-1, h. 92

¹⁰ Abu Yasid, *Fiqh Today : Fikih Keluarga (Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Cet. ke-1, h. 35

Selain daripada itu, motif terjadinya kasus cerai talak akibat intervensi pihak ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap kepribadian suami atau istri berdasarkan kenyataan, bahwa keduanya berkembang di bawah dua bentuk pembinaan dan pendidikan yang berbeda.¹¹ Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial, ia merupakan unit pertama dalam masyarakat. Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak.¹²

Seperti yang terdapat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara : 370/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Atas nama NOFRIZAL bin NASRUL, sebagai “Pemohon” dengan RIZA WAHYUNI binti TUKAR, sebagai “Termohon”.

Dengan duduk perkara :

- a. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- b. Keluarga Termohon (istri) ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon (suami).

¹¹ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-1, Ed. 1, h. 2

¹² Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet. ke-3, h. 1

- c. Antara Termohon (istri) dan Pemohon (suami) sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sepakat untuk bercerai.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 82 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berpekara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon, yaitu memberikan izin kepada Pemohon **Nofrizal bin Nasrul** untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i kepada Termohon **Riza Wahyuni binti Tukar** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.¹³

Maka daripada itu, hampir semua ahli dan penasihat perkawinan berpendapat bahwa sedapat mungkin bahwa rumah tangga yang terdiri dari suami-istri harus berdiri sendiri, lepas dari orang tua masing-masing agar penyusunan rumah tangga bebas dari bermacam-macam pengaruh luar yang tiada selamanya membawa suasana aman.

Anjuran demikian bukanlah berarti akan mengabaikan orang tua dan pihak keluarga lainnya atau berkah dari ayah bunda, melainkan semata-mata untuk menjaga kebebasan suami-istri supaya mereka bebas mendirikan rumah tangga menurut kesanggupan dan cita-citanya. Dan orang tua diharapkan bantuannya dikala perlu atau dalam keadaan darurat, umpamanya pada waktu timbul krisis atau

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 370/Pdt.G/2008/PA.Pbr., Tentang Cerai Talak Tahun 2008

perselisihan yang membutuhkan campur tangan pihak ketiga (orang tua) baik dari pihak suami ataupun istri untuk memberkan jasa-jasanya.¹⁴

2. Faktor Pihak Ketiga

Hampir setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga mendambakan kebahagiaan dalam keluarganya. Guna mencapai kebahagiaan maksimal, semua manusia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memilikinya. Dengan mengerahkan segenap tenaga fisik dan psikis dalam kehidupan demi mengharapkan kebahagiaan hidup berumah tangga. Namun sebagai makhluk sosial, suami atau istri sering menemukan beberapa kenyataan yang dapat menghalangi atau menghambat diri dan warga lain dalam mencapai kebahagiaan yang diharapkannya.¹⁵

a. Siapa Orang Ketiga Itu ?

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah berkembang pendapat bahwa jika seseorang mendirikan rumah tangga, maka sekaligus mempertemu dan menghubungkan dua keluarga dalam suatu ikatan keluarga yang lebih besar dari masing-masing pasangan suami-istri.

Setiap keluarga baru akan diharapkan mau dan mampu menjadi ajang pertemuan, penginapan sementara ataupun lama dari masing-masing pasangan suami-istri. Mereka yang *bertemu*, *menginap* sebentar ataupun lama dan

¹⁴ H. S. M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. ke-1, h. 70

¹⁵ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), Cet. ke-1, h. 80

menumpang di rumah keluarga, itulah yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam sebuah keluarga.

Pihak Orang ketiga dalam sebuah keluarga kadangkala terdiri dari orang tua maupun keluarga-keluarga lain seperti kakak/abang, adik-adik, dan sebagainya, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara : 0472/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Atas nama ALI AMRAN bin DARUS sebagai “Pemohon” dengan AGUSTINA SUSILAWATI binti NURMATHIAS, sebagai “Termohon”. Dengan duduk perkara :

1. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2007 sebelum kelahiran anak ketiga antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a) Adanya campur tangan pihak ketiga (orang tua) Termohon (istri) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon (suami), sedangkan Termohon tidak ada pembelaan terhadap suaminya, sehingga Termohon membenarkan orang tuanya.
 - b) Orang tua Termohon telah banyak menyinggung perasaan Pemohon (suami), sehingga sulit bagi Pemohon (suami) untuk hidup bersama Termohon, sedangkan Termohon tidak ada ‘itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan lebih memilih berpihak kepada orang tuanya.

c) Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut, adalah termasuk alasan perceraian menurut hukum sebagaimana tersebut pada pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan untuk membantah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut; oleh karenanya Permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek, yaitu memberi izin Pemohon **Ali Amran bin Darus** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Agustina Susilawati binti Nurmathias** di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.¹⁶

Selain itu, terdapat juga dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor perkara: 484/Pdt.G/2007/PA.Pbr. Atas nama M. TAUFIK SIREGAR bin H. ABDUL WAHID SIREGAR, sebagai "Pemohon" dengan ENDANG SETYAWATI binti YOS SUWARNO, sebagai "Termohon". Dengan duduk perkara :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0472/Pdt.G/2008/PA.Pbr., Tentang Cerai Talak Tahun 2008

- a. Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk hidup mandiri, dimana sejak pernikahan Pemohon (suami) dan Termohon (istri) menumpang tinggal di rumah orang tua Termohon (istri).
 - b. Adanya campur tangan pihak ketiga yaitu kakak kandung Termohon (istri).
2. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan dengan melibatkan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon hilang kesabaran dan melanjutkan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menimbang, bahwa Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap ke persidangan masing-masing didampingi kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak semaksimalnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 1989 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil; akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon, yaitu memberikan izin kepada Pemohon **M. Taufik Siregar bin H.Abdul Wahid Siregar** menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon **Endang Setyawati binti Yos Suwarno** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.¹⁷

¹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 484/Pdt.G/2007/PA.Pbr., Tentang Cerai Talak Tahun 2007

Oleh sebab itu, banyak daripada orang ketiga pada sebuah keluarga ada yang memerlukan waktu singkat bahkan tidak sampai bermalam, namun tidak jarang orang ketiga harus menginap beberapa malam, minggu dan bulan bahkan bertahun-tahun. Jika orang ketiga tersebut bermaksud baik maka kebaikan dan kebahagiaan dalam keluarga tetap terpelihara dan tidak berkurang bahkan dapat bertambah baik. Namun jika sebaliknya, walaupun dalam waktu yang relatif singkat, maka keberadaannya dalam sebuah rumah tangga dapat membahayakan dan menghancurkan kebahagiaan sebuah rumah tangga.¹⁸

b. Menghadapi Orang Ketiga

Setiap keluarga hendaknya mempunyai sikap yang tepat terhadap orang ketiga dalam rumah tangganya. Ketepatan sikap ini perlu karena dapat menghindarkan timbulnya beberapa permasalahan yang tidak dikehendaki. Seseorang akan mampu dan berkemungkinan mempunyai sikap yang tepat jika kedewasaan, kebijaksanaan, sifat-sifat kepribadian, pemahaman akan ajaran agama dan adat-istiadat masyarakat sekitarnya. Sikap keluarga yang berlebihan atau kurang pantas baik dalam artian yang positif apalagi negatif selalu akan mengundang munculnya beberapa permasalahan dalam keluarga. Oleh karena itu, kesadaran dari masing-masing warga dalam sebuah rumah tangga yang demikian sangat diharapkan, sehingga kehidupan dalam keluarga akan berjalan

¹⁸ Hasan Basri, *op.cit.*, h. 81

sebagaimana mestinya, yaitu rukun, bahagia, bertanggung jawab, tahu diri, dan menyadari kedudukannya masing-masing.¹⁹

B. Putusan Hakim Terhadap Motif Intervensi Pihak Ketiga Sebagai Alasan Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Tak jarang terjadi dalam kenyataan suami-istri yang hidup bersama (berumah tangga) tanpa ada kesulitan dan perselisihan yang datang dengan tiba-tiba. Sehingga kita perlu mempelajari perselisihan-perselisihan yang sering terjadi antara suami-istri tersebut. Karena hal itu merupakan masalah keluarga yang tak dapat dihindarkan, dan itu merupakan suatu hal yang tidak baik, yang pasti akan terjadi, artinya kita tidak dapat melepaskan diri dari perselisihan-perselisihan, dan kita tidak dapat mengabaikan ketika hal itu terjadi. Perselisihan merupakan keburukan-keburukan yang dapat memperkeruh jiwa seseorang dan menghilangkan keharmonisan hidup suami-istri dalam rumah tangga. Perlu kita sadari bahwa perselisihan dan percekcoakan suami-istri dalam rumah tangga, yang sering terjadi pada Sidang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, kesemuanya itu tidak terlepas dari campur tangan pihak ketiga baik orang tua maupun sanak keluarga dalam rumah tangga anak tersebut. Ada sebagian rumah tangga dari suami-istri tersebut bisa diselamatkan, dengan perjanjian pindah atau hidup mandiri dari orang tua (mertua). Namun tidak sedikit dalam Sidang Putusan Hakim Pengadilan

¹⁹ *Ibid*, h. 82

Agama Kota Pekanbaru yang berujung kepada perceraian, dikarenakan suami-istri tidak bisa mempertahankan rumah tangganya.²⁰

Selain daripada itu juga, banyak juga campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga anak, sehingga menimbulkan masalah-masalah hubungan antara orang tua (mertua) dengan anak menantu (suami/istri). Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, ada beberapa bentuk campur tangan pihak ketiga, seperti orang tua (mertua) dalam rumah tangga anak, keluarga pihak istri terhadap suami atau sebaliknya, dan kebanyakan permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah tempat tinggal, masalah keuangan rumah tangga, masalah kebutuhan sekunder (peralatan dan perabotan) rumah tangga, kegiatan sehari-hari anak dan menantu, serta masalah pertengkaran dan perselisihan anak (suami-istri).²¹

Disini kita bisa melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari campur tangan orang tua (mertua) terhadap kehidupan rumah tangga anak (suami-istri). Adapun tolak ukur dari permasalahan campur tangan orang tua ini berawal dari anak menantu (suami-istri) tinggal satu atap dengan orang tua (mertua), disinilah muncul permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga anak. Dan kita bisa melihat konsekuensi-konsekuensi yang dapat diambil dari campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga seseorang, diantaranya :

²⁰ Dra. Hj. Syamsiah Junaid, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, wawancara, 12 Agustus 2009

²¹ Dra. Ilfa Susianti, SH, Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, wawancara, 12 Agustus 2009

1. Pindah atau hidup mandiri;

Terdapat pada Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara : 0472/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Atas nama ALI AMRAN bin DARUS sebagai “Pemohon” dengan AGUSTINA SUSILAWATI binti NURMATHIAS, sebagai “Termohon”. Dengan duduk perkara :

- a. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Termohon (istri), kemudian pindah kerumah sendiri. Selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- 1) AURELIA NOVANDA RAHMADANTI (Pr) Umur 7 Tahun;
- 2) ALVIRA OKTARIVA SALSABILA (Pr) Umur 5 Tahun;
- 3) ALTAF OKTHADAFAMRAN (Lk) Umur 9 Bulan.²²

Suami merupakan penanggung jawab dalam rumah tangga. Sehingga, pada dasarnya salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya adalah menyediakan tempat kediaman (tempat tinggal) :

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya.
- b. Tempat kediaman istri dan anak-anak adalah tempat tinggal yang layak.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

²² Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0472/Pdt.G/2008/PA.Pbr., Tentang Cerai Talak Tahun 2008

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²³

Karena Islam mewajibkan laki-laki yang menjadi suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ (الطلاق : ٦)

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”. (QS. at-Thalaaq : 6)²⁴

Adalah suatu perbuatan yang baik apabila suami menempatkan istrinya disuatu tempat yang bisa melindunginya dari pandangan orang, memungkinkan melakukan hubungan suami-istri dan menjaga harta bendanya. Dalam hal tempat tinggal ini harus diperhatikan juga kemampuan dan dan ketidakmampuan suami, seperti halnya yang berlaku dalam pemberian nafkah dan pakaian.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya di satu rumah yang terpisah, tidak ada seorang pun keluarganya disitu, kecuali yang dikehendaki oleh istrinya. Karena tempat tinggal merupakan

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, Ed. 2, h. 90

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 946

tanggung jawab sang suami, hal ini menjadi wajib atas dirinya, sebagaimana pemberian nafkah.²⁵

Mazhab Maliki mengatakan bahwa suami wajib menempatkan istrinya di tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan dan kondisinya, dengan segala peralatan yang diperlukannya.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa suami wajib menyiapkan tempat tinggal yang layak menurut kebiasaan yang berlaku, tanpa melihat kemampuan dan kondisinya. Hal ini berbeda dengan pemberian nafkah dan pakaian, yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan ketidakmampuan suami.

Dengan demikian, jaminan terhadap pemenuhan semua keperluan bukanlah karena adanya hubungan kekerabatan, melainkan karena adanya hubungan suami-istri.²⁶

2. Tetap bertahan hidup di rumah orang tua.

Jika dilihat lebih jauh mengapa muncul anjuran berdiri sendiri, akan terlihatlah bahwa dalam hal ini bukan saja mengenai kebebasan suami-istri mendirikan rumah tangganya, melainkan juga faktor-faktor lain yang merupakan kesulitan dalam hubungan kehidupan rumah tangga. Termasuk masalah campur

²⁵ Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. ke-3, h. 37

²⁶ *Ibid*, h. 38-39

tangan orang tua (ibu mertua) dengan istri yang seringkali menjadi suatu problem yang sangat jelas bagi seorang laki-laki (suami).²⁷

Terdapat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara : 263/Pdt.G/2007/PA.Pbr. Atas nama MUHAMMAD SYAFI'I, S.Pd bin Dr. DASRIL MASKAR, M.BA., sebagai "Pemohon" dengan ALFA HARIANI, SE binti Ir. H. MUHARNES, sebagai "Termohon". Dengan duduk perkara :

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini disebabkan oleh :
 - 1) Termohon (istri) tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya pada hal Pemohon (suami) sudah mengontrakkan rumah.
 - 2) Termohon lebih mendengarkan pendapat orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.
 - 3) Termohon selalu menceritakan perihal rumah tangga kepada orang tuanya sampai sekecil apapun, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan mertua.²⁸

Dalam hal ini, memang harus diakui banyak pintu kesulitan yang mungkin muncul karena mencampurkan pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, seorang istri harus tinggal serumah dengan mertuanya, mungkin sekali

²⁷ H. S. M. Nasaruddin Latif, *op.cit.*, h. 71

²⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 263/Pdt.G/2007/PA.Pbr., Tentang Cerai Talak Tahun 2007

istri selalu merasa sebagai orang luar di dalam rumah tersebut. Mungkin famili di situ tidak sengaja dan menganggap demikian, tetapi keadaan dan rasa sebagai orang luar itu kadang-kadang sukar dihilangkan.²⁹

Begitu juga dalam hubungan rangkaian persoalan menantu dan mertua, termasuk kesulitan-kesulitan yang bisa muncul, yaitu bukan istri saja yang tinggal bersama mertuanya, melainkan juga suami yang tinggal bersama mertuanya. Dilihat dari sifat-sifat perkembangan, timbulnya kesukaran tidak sebesar dan sebahaya mencampurkan istri dengan ibu mertua (orang tua dari suami).

Jika suami tinggal terus di rumah mertuanya, tidak berapa lama sesudah bulan perkawinan, suami akan merasa bahwa ia bukan kepala rumah tangga, sebab yang jadi kepala rumah tangga ialah mertua laki-lakinya. Sebagai menantu yang datang kemudian, ia hanya ibarat *abu di atas tunggul* pada rumah tangga tersebut. Biasanya dengan maksud-maksud yang baik, pihak mertua ikut juga mencampuri urusan-urusan anak dan menantunya. Ibu dari istri kadang-kadang membandingkan tabiat dan sifat-sifat menantunya itu dengan suaminya sendiri yang memang telah banyak makan asam garam dalam kehidupan di dunia ini. Perbuatan atau kesalahan-kesalahan kecil yang dilihat pada menantunya memberikan jalan baginya untuk mengajari anak berlaku begini atau supaya bertindak begitu sehingga dengan tidak

²⁹ H. S. M. Nasaruddin Latif, *op.cit.*, h. 71

disadari mertua bertindak sebagai sutradara dalam mengatur dalam rumah tangga anak-anaknya.³⁰

Di samping itu, harus diakui bahwa baik dalam soal istri tinggal bersama dengan mertuanya atau sebaliknya, yaitu suami tinggal bersama dengan mertuanya. Tentulah semuanya ada pengecualian, sebab ada juga menantu dan mertua yang hidup rukun dan damai sebagai orang tua dengan anak sendiri.

Guna menjaga timbulnya kesulitan-kesulitan yang memang seringkali muncul karena campur tangan dari pihak ketiga. Sebab, anjuran berdiri sendiri bagi suami-istri sedapat mungkin dapat dijalankan. Namun, jika keadaan tidak mengizinkan berbuat demikian karena suatu sebab, umpamanya karena sukarnya situasi rumah tangga atau orang tua (ayah dan ibu) serta famili-famili yang lain ingin atau memaksa harus tinggal serumah dengan suami dan istrinya, hal tersebut sekali-kali tidak boleh ditolak. Hanya saja, dalam keadaan demikian haruslah diusahakan supaya orang tua (ayah dan ibu) tersebut merupakan tempat yang bisa memberikan pengertian dan masukan-masukan yang baik dalam rumah tangga anak dan menantunya. Tidak seorangpun dapat memungkiri bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup berumah tangga, campur tangan semacam itu sangat diperlukan kepandaian dan kebijaksanaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, baik suami maupun istri atau orang tua (mertua) serta famili-famili yang bersangkutan hendaklah sama-sama menjaga dan menghormati batas-batas yang

³⁰ *Ibid*, h. 73

sesungguhnya agar ketentraman rumah tangga dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya.³¹

3. Memutuskan hubungan rumah tangga (cerai);

Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, hendaknya diselesaikan secara terbuka antara suami-istri, dengan pikiran yang jernih dan tenang. Jangan sampai konflik tersebut dibawa keluar rumah, misalnya ke keluarga masing-masing, sebab belum tentu akan menyelesaikan masalah, malah akan memperpanjang masalah, karena biasanya unsur keberpihakan akan mempengaruhi penyelesaian konflik dalam rumah tangga tersebut. Umumnya konflik disebabkan alasan-alasan yang sepele. Karena emosi yang menguasai hingga menyempitkan otak untuk berpikir jernih. Bila konflik sudah berpindah ke luar rumah, suka membesar serta sulit untuk diselesaikan.³²

Pada saat Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 263/Pdt.G/2007/PA.Pbr., Tentang Cerai Talak Tahun 2007 Atas nama MUHAMMAD SYAFI'I, S.Pd bin Dr. DASRIL MASKAR, M.BA., sebagai "Pemohon" dengan ALFA HARIANI, SE binti Ir. H. MUHARNES, sebagai "Termohon". Dengan duduk perkara :

- a. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon (suami), sudah tidak sabar lagi atas tindakan Termohon (istri) yang demikian, serta

³¹ *Ibid*, h. 74

³² Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. ke-1, h. 92

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon (suami) berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 484/ Pdt.G/ 2007/ PA.Pbr. Tentang Cerai Talak Tahun 2007 Atas nama M. TAUFIK SIREGAR bin H. ABDUL WAHID SIREGAR, sebagai “Pemohon” dengan ENDANG SETYAWATI binti YOS SUWARNO, sebagai “Termohon”. Dengan duduk perkara :

- a. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan dengan melibatkan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon (suami) hilang kesabaran dan melanjutkan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Berdasarkan permohonan Pemohon (suami) kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara : 370/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Atas nama NOFRIZAL bin NASRUL, sebagai “Pemohon” dengan RIZA WAHYUNI binti TUKAR, sebagai “Termohon”. Dengan duduk perkara :

- a. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sepakat untuk bercerai.

Maka, pada saat suami-istri tidak berhasil mencapai kata sepakat atau berbaikan untuk menghindari setiap pengaruh dari luar demi menjaga kesucian kehidupan keluarga antara suami-istri, dan untuk menjauhkan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk diketahui bahkan orang terdekat, yaitu kehormatan dan rahasia rumah tangga. Dalam hal ini, mereka (suami-istri) tidak boleh tidak suami-istri mesti berdamai dengan memakai perantara secara terang-terangan, yang keputusannya dapat mengeluarkan mereka (suami-istri) dari masalah-masalah yang dihadapi.³³ Hal ini bukan berarti tidak bisa dimusyawarahkan sama sekali, justru jika suami-istri sulit berdamai, disebabkan karena terus menerus bertengkar, maka jalan yang mesti ditempuh adalah dengan jalan musyawarah. Allah SWT berfirman :

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها
إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا.
(النساء : ٣٥)

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisaa’ : 35)³⁴

Maksud ayat di atas, jika kalian khawatir suami-istri tidak bisa disatukan serta hidup berdampingan, kemudian masing-masing memilih untuk mengakhiri pernikahan (perkawinan) dengan jalan perceraian. Maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan

³³ Kamil al-Hayali, *op.cit.*, h. 67

³⁴ Depag RI, *op.cit.*, h. 123

sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁵

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada Bab I dalam penelitian ini berdasarkan alasan/dalil-dalil oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2007-2009. Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, ada 5 (lima) perkara yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai intervensi (campur tangan) pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga. Yaitu Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Diantara lima perkara tersebut adalah Perkara Nomor : 484/Pdt.G/2007/PA.Pbr; Perkara Nomor : 263/Pdt.G/2007/PA.Pbr; Perkara Nomor : 370/Pdt.G/2008/PA.Pbr; Perkara Nomor : 0472/Pdt.G/2008/PA.Pbr; dan Perkara Nomor : 0590/Pdt.G/2008/PA.Pbr. Pada tanggal 18 Februari 2009.³⁶ Semuanya menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan pada pasal 113 bab XVI dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Dan ditegaskan dalam

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, h. 152

³⁶ Grafik Data Perkara pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Tahun 2007-2009

Pasal 114 : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Kemudian juga yang menjadi pertimbangan adalah pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, menyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³⁷

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Cerai Talak Akibat Intervensi Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga.

Keluarga (rumah tangga) di dalam Islam itu tidak kan terbentuk dan tidak akan tegak kecuali dengan jalan yang telah disyari’atkan, yaitu perkawinan. Dan sungguh manusia itu telah diberi dorongan atau watak ketertarikan dan keserasian baik secara fisik maupun kejiwaan dengan lawan jenisnya yang tidak mungkin dapat dihindari. Oleh karena itu Allah SWT telah mengancam dengan suatu ancaman dan juga mengharamkan perbuatan itu (zina) dalam bentuk apapun kecuali dengan cara-cara yang telah disyari’atkan, yaitu perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan-tujuan tertentu yang tidak mungkin dapat dihindarkan, yaitu kepuasan

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-1, Ed. 1, h. 274

syahwat yang suci, mendapatkan keturunan dengan cara yang dibenarkan, kecenderungan jiwa untuk memberikan kasih sayang, ketenangan, dan juga saling tolong menolong atas segala kesulitan dan permasalahan-permasalahan hidup.³⁸

Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (النساء : ١)

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. an-Nisaa’ : 1)³⁹

Keluarga dalam Islam adalah suatu sistem kehidupan masyarakat yang terkecil dibatasi oleh adanya keturunan (*nasab*) atau disebut juga *ummah* akibat oleh adanya kesamaan agama. Dan ini dapat dibuktikan dengan melihat kehidupan sehari-hari umat Islam.⁴⁰

Jika seorang perempuan (gadis), ketika ia tinggal di rumah orang tuanya, ia berkewajiban mematuhi segala aturan-aturan oleh orang tua. Akan tetapi, bila ia telah menikah (berumah tangga), peranannya sudah berubah dan wajib mentaati segala

³⁸ Suhailah Zainul ‘Abidin Hammad, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), Cet. ke-1, h. 20

³⁹ Depag RI, *op.cit.*, h. 114

⁴⁰ Ramayulis, *op.cit.*, h. 2

aturan yang ada di rumah suaminya. Seorang istri harus mengutamakan kebutuhan suaminya, ia harus menuruti segala perintah suaminya (selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama), walaupun harus itu membuat orang tuanya tidak senang. Tidak mentaati suami dapat membahayakan ikatan perkawinan dan sebaliknya. Terlebih lagi, banyak kaum ibu yang tidak mengenyam pendidikan yang layak dan tidak memiliki kebijaksanaan.⁴¹

Seorang laki-laki menjadi berharga bagi istrinya, walaupun istrinya adalah seorang yang pandai atau seorang peneliti selama istri itu rela dia menjadi suaminya. Dan dengan sifatnya sebagai pemimpin atas perempuan, maka dia memiliki hak-hak atas istri yang harus diberikan kepadanya, diantaranya :

1. Menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah.⁴² hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. (النساء: ٣٤)

Artinya : “ Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS. an-Nisaa' : 34)⁴³

⁴¹ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-6, h. 76

⁴² Suhailah Zainul 'Abidin Hammad, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*, (Jakarta: Mustaqiim, 2002), Cet. ke-1, h. 78

⁴³ Depag RI, *op.cit.*, h. 123

Yang dimaksud dengan menjaga diri ketika suami tidak ada adalah menjaga segala sesuatu yang dimiliki oleh suami, dan dia juga memegang amanah ketika suaminya tidak ada. Diantara yang perlu dijaga adalah nama baiknya, keturunannya, kehormatannya, kemuliannya, harta dan rahasia-rahasiannya. Maksudnya adalah semua yang dimilikinya.⁴⁴

2. Mentaati suami, kecuali perintah untuk berbuat maksiat. Wanita yang baik adalah apabila engkau melihatnya maka engkau akan tertarik kepadanya, dan apabila engkau perintah maka dia mentaatinya, dan apabila engkau tidak ada maka ia akan menjaga harta dan jiwanya.
3. Mempergaulinya dengan baik, mempercayainya, menghormati dan mencintai keluarganya. Selain itu, hendaklah dia membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah, berbuat baik kepada keluarganya dan ikhlas dalam pengabdian kepada suaminya. Dan hendaklah dia hidup bersama suaminya dalam kondisi bagaimanapun dan tidak membebani suaminya melebihi batas kemampuannya dan tidak menampilkan perhiasannya kecuali untuk suaminya.⁴⁵

Maka daripada itu, banyak daripada ibu-ibu (orang tua) baik dari pihak suami ataupun istri, belum menyadari bahwa anak-anak perempuan mereka harus mempunyai pengertian dengan suami mereka. Pasangan yang sudah menikah harus dibiarkan untuk

⁴⁴ Suhailah Zainul 'Abidin Hammad, *loc.cit.*

⁴⁵ *Ibid*, h. 79

merencanakan urusan mereka dan bila mereka (suami-istri) mengalami kesulitan, mereka harus mengatasinya dengan inisiatif mereka sendiri.⁴⁶

Adapun kesulitan-kesulitan terbagi beberapa macam bentuk, diantaranya perbedaan keinginan dalam menyusun anggaran rumah tangga, persoalan anak, persoalan orang tua, dan lain sebagainya. Mengenai kesulitan-kesulitan tersebut, sejak awal harus diketahui oleh bagi suami-istri agar mereka mendapat gambaran yang jelas tentang permasalahan-permasalahan yang patut mendapat perhatian mereka sepenuhnya sebelum bahtera kehidupan rumah tangga mereka kandas.

Ada beberapa kesulitan yang kadang-kadang terdapat dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya dua faktor yang bisa mengancam ketentraman sebuah rumah tangga, diantaranya faktor orang tua (mertua) dan pihak ketiga (famili dari pihak suami atau istri).⁴⁷

Banyak ibu dari istri (mertua) seringkali tidak menyadari ini, mereka sering membuat menantu laki-laki mereka melakukan sesuatu menurut kehendak ibu mertua. Mereka (orang tua) berusaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencampuri urusan rumah tangga anak-anak mereka. Para orang tua (ibu mertua) terus menerus mengajarkan kepada anak-anak perempuan mereka apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat dan apa yang harus dikatakan serta apa yang tidak boleh dikatakan. Anak perempuan yang malang ini, yang menganggap ibunya bersimpati

⁴⁶ Ibrahim Amini, *loc.cit.*

⁴⁷ H. S. M. Nasaruddin Latif, *op.cit.*, h. 69

kepadanya dan telah berpengalaman dalam berumah tangga, menuruti dan melakukan apa yang diinginkan oleh ibunya.⁴⁸

Memang tidak ada masalah bila menantu pria itu menyerahkan kepada keinginan mertuanya, tetapi bila ia tetap pada pendiriannya, maka percekocokan akan mulai terbentuk. Dalam masalah ini, sang ibu mertua dapat menjadi begitu keras hati yang pada gilirannya akan mengakibatkan rusaknya kehidupan keluarga anak perempuannya. Orang tua (ibu) yang bersikap tidak peduli itu, bukannya mengajarkan kepada anak-anak perempuannya untuk mematuhi suaminya, tetapi kebanyakan orang tua membuat anak-anak perempuannya menentang kepada suami (menantu). Kebanyakan dalam rumah tangga yang sering terjadi percekocokan akibat dari orang tua (sang ibu) dari pihak istri yang tak sepadan dengan menantu laki-lakinya. Dan sering orang tua (ibu mertua) mengatakan kepada anak-anak perempuannya : *“Kau telah menghancurkan hidupmu. Betapa bodohnya suamimu!. Betapa banyaknya orang-orang baik yang telah melamarmu. Betapa enaknya hidup saudara-saudaramu yang lain. Betapa beruntungnya kakakmu bersuamikan orang kaya. Apa saja yang mereka miliki yang tidak kamu miliki?. Mengapa kamu harus hidup seperti ini?. Oh, anakku yang malang”*. Ibu (orang tua), yang kata-katanya yang dianggap sebagai menyebar rasa sempati itu, menyebabkan percekocokan dan perdebatan antara anak perempuan dengan suaminya dalam rumah tangga.⁴⁹

⁴⁸ Ibrahim Amini, *loc.cit.*

⁴⁹ *Ibid*, h. 77

Kemelut yang melanda rumah tangga memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat umum. Namun, Islam dengan ajarannya tentu saja tidak bisa tinggal diam membiarkan fenomena tersebut terjadi dikalangan umatnya. Hal tersebut menjadi sangat penting bagi umat Islam yang telah membina rumah tangga dan berharap bahwa keharmonisan yang menjadi harapan disetiap saat hingga akhir hayatnya.⁵⁰

Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan pernikahan (perkawinan). Karena pernikahan bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵¹

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga anak yang tidak pantas dibiarkan dan tinggal diam, sehingga berlarut-larut jika memang mengharapkan kebahagiaan dalam keluarga tetap utuh dan berkembang. Kita perlu mengambil langkah-langkah yang tepat sebelum sesuatu permasalahan itu timbul, namun jika telah terjadi tidaklah pantas jika kita selalu mencari kambing hitam dan saling menuduh antara pihak satu dengan pihak lainnya.

⁵⁰ Kamil al-Hayali, *op.cit.*, h. 2

⁵¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 17

Setiap permasalahan dalam keluarga, besar ataupun kecil, sedikit banyak akan memberikan dampak negatif dalam rumah tangga dan mengurangi taraf kebahagiaan, minimal akan mengalami sedikit gangguan. Kesadaran yang demikian akan mendorong kita agar segera berusaha mencegahnya, sebelum bencana dan penderitaan yang lebih besar datang menimpa kehidupan rumah tangga (keluarga). Mudah-mudahan kondisi “*baiti jannati*” rumahku adalah syurgaku, dapat kita wujudkan dan terpelihara sebagaimana mestinya.⁵²

⁵² Hasan Basri, *op.cit.*, h. 87

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian yang terdahulu dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Campur tangan (intervensi) pihak ketiga, seperti orang tua baik dari pihak istri maupun suami dalam rumah tangga berakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Karena kebanyakan daripada orang tua masih merasa bahwa anak-anaknya (suami atau istri) masih merupakan tanggung jawabnya dan keluarganya. Biasanya terjadi perselisihan antara suami-istri dalam rumah tangga disebabkan adanya campur tangan pihak ketiga dalam masalah keuangan/ekonomi keluarga, baik itu pemberian nafkah, tempat tinggal, peralatan dan perabotan rumah tangga dan lain sebagainya.
2. Suatu kecerobohan jika pihak ketiga yakni orang tua baik dari pihak suami atau istri terlalu mencampuri dalam segala persoalan urusan rumah tangga anak-anaknya. Karena tugas orang tua hanyalah memberi nasihat dan saran bila sang anak telah lalai akan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri. Oleh sebab itu, orang tua haruslah cermat membaca dilema rumah tangga anak-anaknya. Sehingga mereka mampu memberikan solusi terbaik demi kekekalan rumah tangga sang anak, bukan malah menambah kekacauan hidup dalam rumah tangga sang anak.

3. Selain daripada itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dalam sebuah rumah tangga, diantaranya faktor keluarga dan faktor orang ketiga. Orang ketiga dalam sebuah keluarga kadangkala terdiri dari orang tua maupun keluarga-keluarga lain seperti kakak/abang, adik-adik, dan sebagainya.
4. Batas kewajiban orang tua terhadap sang anak sampai sang anak mencapai usia baligh. Akan tetapi, bila sang anak telah berumah tangga, maka lepaslah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, posisi orang tua di hadapan keluarga si anak hanyalah sebagai pengontrol dan pengawas di balik tabir, dan bukan sebagai penghancur rumah tangga anak.
5. Perselisihan dan percekocokan suami-istri dalam rumah tangga, pada Sidang Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, kesemuanya itu tidak terlepas dari campur tangan pihak ketiga, baik dari orang tua maupun keluarga-keluarga lainnya seperti kakak/abang, adik-adik, dan sebagainya. Sehingga banyak memberikan dampak negatif dalam sebuah rumah tangga dan biasanya berujung pada perpisahan (perceraian).
6. Pernikahan (perkawinan) merupakan ikat lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, demi terjalannya kasih sayang antar anggota keluarga.

B. Saran

1. Diharapkan kepada suami-istri yang apabila terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga jangan sampai permasalahan tersebut di bawa keluar rumah, dan diselesaikan secara damai dengan hati yang dingin pikiran yang jernih. Agara permasalahan tersebut bisa teratasi.
2. Diharapkan kepada pihak ketiga, yaitu orang tua atau mertua dapat memberikan masukan-masukan dan saran yang baik terhadap anak menantu apabila terjadi konflik yang membelenggu rumah tangganya. Saran dan masukan-masukan orang tua atau mertua tersebut tentu harus berpijak pada perbaikan rumah tangga sang anak.
3. Diharapkan kepada pihak ketiga, baik orang tua atau mertua dan pasangan suami-istri lebih mengetahui dan memahami tentang pernikahan (perkawinan), baik dari segi pengertian sampai pada hikmah dilakukan pernikahan (perkawinan), demi menjaga keutuhan rumah tangga.
4. Diharapkan kepada instansi terkait, seperti Hakim Pengadilan Agama, agar dapat memberikan pengertian dan masukan terhadap pasangan suami-istri yang ingin melakukan perceraian akibat dari campur tangan (intervensi) pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: tp., 1995)

Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan : Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Cet. ke-1

Abu Yasid, *Fiqh Today : Fikih Keluarga (Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Cet. ke-1

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. ke-3

Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 1 : Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet. ke-6

Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 5 : Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet. ke-3

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-1, Ed. 1

A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-1

Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa ? : Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), Cet. ke-1

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata-cara dan Hikmahnya*, (Bandung: Karisma, 1999), Cet. ke-10

Anshari Tahyib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992)

Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. ke-4

B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), Cet. ke-1

Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989)

Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)

Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaku*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-7

Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), Cet. ke-1

H. Bgd M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), Cet. ke-2

H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Cet. ke-9

H. S. M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. ke-1

Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-6

Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-2

Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-1, Ed. 1

Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. ke-3

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, Ed. 2

Muslich Shabir, *Terjemah Riayadlus Shalihin*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1985), Cet. ke-1

M. Thalib, *10 Harapan Menantu kepada Mertua*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), Cet. ke-1

M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), Cet. ke-1

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. ke-4, Ed. 3

Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet. ke-3

Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Cet. ke-1

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2

Suhailah Zainul 'Abidin Hammad, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*, (Jakarta: Mustaqiim, 2002), Cet. ke-1

SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profile Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007)

T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. ke-1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Medan: Duta Karya, 1995), Cet. ke-1

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Medan: Duta Karya, 1989)

W. J. S. Poerwadarminta, diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. ke-3, Ed. 3

Zainul Bahry, *Kamus Umum (Khususnya Bidang Hukum & Politik)*, (Bandung: Angkasa, 1996), Cet. ke-1